



**MONITORING DAN EVALUASI WBS
TRIWULAN II TAHUN 2017
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/8459/XII/2016/Bareskrim tanggal 30 Desember 2016 perihal usulan sebagai Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/169-1/IV/2017/Tipidkor tanggal 5 April 2017 tentang disamping melaksanakan tugas sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai *Tim Whistle Blower System* (WBS).

2. PELAKSANAAN

Sekitar bulan Februari 2017, Dittipidkor Bareskrim Polri telah mengeluarkan sistem *Whistle Blower System* (WBS) yang dapat diakses, dengan kata lain Dittipidkor membuka dan melayani pengaduan atau laporan terkait WBS. WBS adalah aplikasi yang disediakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi dilingkungan Polri.

Dari data yang ada, pada Triwulan II tahun 2017 Dittipidkor Bareskrim Polri menangani personel Polri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksanaan (P-21) atas nama tersangka AKBP Kristian P. Siagian S.I.K., M.Si. Sampai dengan saat ini, total penanganan anggota Polri yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri terdapat 8 (delapan) tersangka.

Mengingat pentingnya sistem pengaduan ini, maka Dittipidkor Bareskrim Polri terus melakukan monitoring sidang dan koordinasi pada Satker terkait guna kepastian tindak lanjut penanganan terhadap personel Polri yang telah menerima vonis hakim dan menjalani hukuman.

3. KESIMPULAN

1. Pada Triwulan II ini, Dittipidkor Bareskrim Polri belum menerima atau menangani laporan pengaduan melalui WBS.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi secara berkala terkait sistem pelaporan WBS yang dibuat oleh Dittipidkor Bareskrim Polri melalui website.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi WBS dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan II ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI